

Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja

Ardiyanto (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Juanda Nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Lukman Irwan (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: ardiyanto12@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick', Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick' and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in the ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.

Keywords: *implementation, local culture, public service*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi', barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi' dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.

Kata kunci: *implementasi, budaya lokal, pelayanan publik*

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa nilai-nilai lokal akan terkikis seiring dengan perkem-

bangsan yang ada. Selain itu, kecintaan terhadap nilai-nilai budaya lokal semakin berkurang, padahal nilai-nilai lokal merupakan nilai yang mengandung makna yang tinggi bagi seorang penganutnya. Oleh sebab itu, peles-

tarian budaya dipandang penting untuk tetap menjaga ciri khas suatu daerah sebagai sebuah identitas. Hal ini merupakan hal yang penting untuk dikaji dan diteliti untuk tetap menjaga nilai-nilai lokal yang ada pada suatu daerah. Pentingnya penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sebuah upaya untuk menganalisis nilai budaya lokal dalam tatanan pemerintahan dalam upaya pengembangan nilai-nilai lokal sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Penulis akan menganalisis pelayanan perizinan yang dilakukan secara terpadu berdasarkan nilai lokal yang disebut dengan Tallu Bakaa. Oleh sebab itu, judul penelitian ini adalah "Analisis Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja" yang terkait dengan budaya lokal yaitu Tallu Baka (Kinaa, Manarang dan Sugi').

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus di tingkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan implementasi program pembangunan kesehatan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan kesehatan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya implementasi program pembangunan kesehatan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk sama-sama melaksanakan program pembangunan kesehatan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran implementasi program pembangunan kesehatan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi program pembangunan kesehatan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam upaya pencapaian implementasi program pembangunan kesehatan tersebut.

Dalam konteks implementasi pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya implementasi program pembangunan kesehatan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasi akan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Kecamatan Gantarang Keke yaitu : penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam implementasi program pembangunan kesehatan. Pemberian kreativitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan kesehatan.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Kecamatan Gantarang Keke ikut berpartisipasi dengan berbagai macam alasan. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan kesehatan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya implementasi program pembangunan kesehatan yang maksimal.

Sebagai sarana partisipasi masyarakat di desa telah dibentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (LPKM). Melalui lembaga ini masyarakat diharapkan dapat membantu

mempercepat atau mengefektifkan pembangunan kesehatan di Kecamatan dan pembangunan nasional pada umumnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, selain perhatian diharapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan kesehatan serta hasil-hasil hendaknya pembangunan kesehatan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka.

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke yaitu pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk kegiatan penyuluhan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, imunisasi, pengobatan penyakit diare, dan pelayanan gizi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses implementasi pembangunan kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan tersebut

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja. Pada umumnya kegiatan penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. Penelitian ini akan lebih menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan juga berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap nilai budaya lokal yang ada di Tana Toraja berbeda-beda, ada yang memahamainya sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dari pada yang lain dan adapula yang memahamainya bahwa orang Toraja terkenal dengan atheis atau kepercayaan aluk todolo. Pemahaman tersebut masih sangat kurang untuk seorang aparatur pemerintahan, bahwa aparatur hanya memahami sebatas adat istiadat, bukan berdasarkan nilai budaya lokal Tana Toraja.

1. Kinaa

Dalam penelitian ini, Kinaa artinya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan aktifitas pelayanan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, nilai budaya lokal ini diterapkan pada Kantor pelayanan perizinan terpadu. Aparatur dalam menjalankan pelayanan, melaksanakan kewajiban dengan tidak berpihak, semua yang datang dilayani sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada.

Kinaa dalam hubungannya dengan pelayanan pemerintahan sebagai salah satu nilai dalam lingkup nilai tallu bakaa, merupakan nilai yang mendukung sepenuhnya untuk dikembangkan dalam pelayanan pemerintahan. Khususnya para aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya harus memiliki sikap kinaa, sehingga dalam melaksanakan kewajibannya masyarakat merasa nyaman untuk dilayani. Kinaa merupakan salah satu nilai yang menurut penulis wajib untuk dimiliki aparatur pemerintah daerah sehingga akan mendukung dalam proses pelayanan. Berdasarkan pandangan masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada pelayanan pemerintahan kaitannya

dengan bagian nilai budaya lokal tallu bakaa yakni kinaa. Masyarakat memiliki pandangan bahwa pada dasarnya aparatur memiliki sikap kinaa, hanya yang menjadi persoalan bahwa aparatur sesungguhnya tidak memahami dengan baik makna dari kinaa tersebut. Jadi meskipun pandangan masyarakat bahwa aparatur sudah menunjukkan sikap kinaa sebagai masyarakat Toraja akan tetapi penulis berkesimpulan bahwa penerapan kinaa dalam pelayanan pemerintahan belum dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan nilai-nilai yang sesungguhnya dari kinaa tersebut.

2. Sugi'

Sugi' (kaya) dalam lingkup nilai budaya lokal tallu bakaa, dapat berarti kaya dalam hal materi, ilmu pengetahuan, etika dan hubungan dengan sang pencipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemahaman, sugi' (kaya) dipahami sebagai hal materi adapula yang memahami dalam hal kaya akan sikap sopan dan santun kaya dan akan pengetahuan. Penerapan sugi' (kaya) dalam pelayanan pemerintahan tidak semuanya diterapkan seperti hal yang dipahami. Sugi' (kaya) dalam hal materi tidak diterapkan pada kantor Pelayanan Perizinan terpadu ini.

Sugi' (kaya) dalam hubungannya dengan pelayanan pemerintahan, merupakan nilai dalam lingkup tallu bakaa yang harus dipahami dengan baik oleh para aparatur pemerintah daerah. Sugi' dalam hal nilai budaya memang berarti kaya dalam hal materi, akan tetapi bukan berarti bahwa dalam melakukan kewajiban sebagai aparatur pemerintah daerah maka harus memperkaya diri. Memperkaya diri dalam hal materi tidak disalahkan asalkan diperoleh dengan cara yang halal. Namun, secara khusus dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah, sugi' (kaya) harus diterapkan bahwa sebagai aparatur harus senantiasa belajar dan memperlengkapi diri dengan ilmu

pengetahuan, etika dan moralitas dalam memberikan pelayanan pemerintahan.

Bagi masyarakat Toraja, jika seseorang sugi' (kaya) dalam hal materi, maka orang tersebut akan mempunyai kedudukan. Namun, akan lebih dihargai apabila seseorang sugi' (kaya) dalam hal etika dan moralitas. Sebagai salah satu contoh, seseorang akan lebih dihargai apabila memiliki kekayaan moralitas dan etika yang tinggi, dibanding mereka kaya akan materi, ketika orang tersebut meninggal orang-orang akan mengenang etika dan moralitasnya, tetapi meskipun orang sugi' (kaya) dalam hal materi tetapi etika dan moralitasnya tidak dapat diterima oleh masyarakat umum, atau bahkan kekayaannya diperoleh melalui cara yang tidak halal maka kekayaan materi tersebut akan dipandang sebelah mata.

Kekayaan dalam pengetahuan menurut hasil pengamatan penulis bahwa hal ini tidak diterapkan secara khusus dalam upaya memperlengkapi diri dalam hal kebudayaan dan nilai-nilai lokal yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pemahaman aparaturnya tentang nilai budaya lokal tallu bakaa.

Berdasarkan hasil penelusuran media elektronik, sampai saat ini penulis belum menemukan kasus yang berkaitan dengan upaya memperkaya diri dalam hal materi yang dilakukan oleh aparaturnya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan sistem online dengan sarana yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya.

3. Barani

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sikap barani (barani) senantiasa ditunjukkan oleh aparaturnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Toraja. Sikap barani (berani) diterapkan melalui sikap yang mau menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai

contoh bahwa jika ada yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan maka yang bersangkutan akan memasukkan berkas, setelah melalui proses kemudian sampai pada peninjauan lapangan maka akan ditinjau dan ditentukan sesuai dengan aturan yang ada. Barani (berani) dalam hubungannya dengan pelayanan pemerintahan merupakan nilai mendukung untuk dikembangkan. Berani dalam hal ini adalah karena kebenaran dan berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sikap berani sebagai bagian dari nilai lokal tallu bakaa, merupakan hal yang wajib dimiliki oleh aparaturnya daerah dalam rangka menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat tentang sikap barani oleh aparaturnya, dari semua informan menyatakan bahwa sebagai masyarakat Toraja, para aparaturnya sudah menunjukkan sikap barani dalam menjalankan pelayanan pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diterbitkannya izin yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan karena dilakukan secara terpadu maka semua pihak terlibat di dalamnya. Jadi terbitnya suatu izin merupakan tanggung jawab semua aparaturnya yang ada. Sebagai upaya dalam melestarikan nilai budaya suatu daerah, maka harus ada faktor yang mendukung dalam penerapan nilai budaya tersebut. Demikian pula dengan nilai budaya lokal tallu bakaa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan ada beberapa faktor yang mendukung penerapan budaya lokal tallu bakaa pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dari 11 orang aparaturnya yang bekerja pada kantor pelayanan perizinan terpadu, hanya ada tiga aparaturnya yang bukan berasal dari Toraja, yakni Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha, dan Kasie Pemberbitan Izin. Tingkat pemahaman nilai budaya lokal aparaturnya pemerintah daerah yang berasal dari suku Toraja sebagai salah satu pendukung.

2. Adanya dorongan dalam diri aparaturnya pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban bahwa sebagai orang Toraja kita harus menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari orang Toraja yang harus melestarikan budaya itu. Dalam menjalankan tugas aparaturnya didorong oleh keinginan untuk tetap menjalankan kewajiban sesuai dengan kebudayaan yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan. Hal ini tentunya mendukung penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa juga dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Toraja.

3. Adanya dukungan dari pimpinan, meskipun pimpinan bukan berasal dari suku toraja asli, akan tetapi beliau mendukung pengembangan nilai budaya lokal yang ada di Tana Toraja. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dikembangkannya budaya lokal tallu bakaa secara khusus pada KPPT. Selain faktor pendukung, hasil penelitian ini menemukan adanya faktor yang menghambat penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat akan penerapan nilai budaya local diantaranya :

a. Aparatur pemerintah daerah di KPPT yang tidak memahami mengenai nilai budaya lokal tallu bakaa. Meskipun dalam aktifitas pelayanan pemerintahan dalam hal mengurus Izin Usaha Perdagangan, Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan terdapat nilai-nilai budaya lokal tallu bakaa namun sesungguhnya aparaturnya pemerintah daerah tidak memahami secara mendalam. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yaitu aparaturnya pemerintah daerah, ketika ditanya, semua informan tidak memahami tentang nilai budaya lokal tallu bakaa. Kurangnya pemahaman akan nilai budaya lokal tallu bakaa ini merupakan salah satu penghambat dalam penerapannya.

b. Tidak adanya inisiatif dari aparaturnya pemerintah daerah untuk mencari tahu dan mempelajari nilai budaya lokal. Berdasarkan

hasil wawancara dengan informan, ketika peneliti bertanya apakah ada inisiatif dari aparaturnya pemerintah daerah, mereka menjawab bahwa tidak ada upaya untuk mencari tahu dan mempelajari budaya lokal tallu bakaa. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat karena tidak adanya inisiatif untuk belajar akan nilai budaya lokal. Alasan yang disampaikan informan adalah tidak adanya waktu untuk belajar tentang budaya lokal tallu bakaa. Berdasarkan keterangan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya inisiatif untuk mencari tahu merupakan penghambat dalam penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penerapan budaya lokal tallu bakaa (kinaa, sugi' dan barani) dilakukan dalam berbagai macam cara yang diketahui oleh para aparaturnya pemerintah daerah. Kinaa diterapkan dengan tidak melakukan diskriminasi, tanggap akan kebutuhan masyarakat ketika mengurus SITU, SIUP dan IMB, juga dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang fleksibel dengan masyarakat. Sugi' dalam penerapannya dilakukan dengan memperkaya diri dalam hal pengetahuan yang berkaitan dengan kewajiban sebagai pelayan pemerintahan, sugi' dalam hal materi tidak diterapkan dalam pelayanan perizinan usaha perdagangan, tempat usaha dan mendirikan bangunan. Barani diterapkan melalui sikap yang menolak segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena aparaturnya pemerintah daerah tidak memahami arti akan nilai budaya lokal tallu bakaa. Hubungan budaya local dalam pelayanan pemerintahan dapat disimpulkan bahwa budaya lokal turut berpengaruh dalam proses pelayanan pemerintahan namun, tidak mem-

berikan dampak yang besar. hal ini disebabkan karena nilai budaya tersebut tidak diwariskan dengan baik kepada generasi penerus dan generasi sekarang tidak banyak yang meminati untuk belajar nilai budaya. Selain itu, hubungan budaya lokal secara khusus tallu bakaa, akan sangat mendukung dalam pelayanan pemerintahan apabila dipahami dengan baik. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan juga akan memberikan dampak yang positif bagi pelestarian nilai budaya dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Dalam penerapan budaya lokal tallu bakaa terdapat faktor yang mendukung, seperti aparatur pemerintah yang berasal dari suku Toraja, adanya dorongan dalam diri aparatur pemerintah daerah dan adanya dukungan dari pimpinan. Namun, ada pula faktor yang menghambat seperti aparatur pemerintah daerah yang tidak memahami nilai budaya lokal tallu bakaa dan tidak adanya inisiatif untuk belajar mengenai nilai budaya lokal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailusy, Kausar. 2013. "Demokrasi dan Eksistensi Adat di Indonesia (Studi tentang Masyarakat Adat Toraja). *Prosiding Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari*.
- Barnabas. 1993. Peran Partai Politik di Tana Toraja. Skripsi Fakultas Sastra UNHAS.
- Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- BTPM Kota Makassar. 2015. Mekanisme dan Prosedur Perizinan. <http://bptpm.makassar.go.id> (diakses, 15 Mei 2016)
- Endaswara, Suwardi. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahri Rezky Rahman. 2013. Aktualisasi Nilai Budaya Lokal dalam Pemerintahan di Kota Palopo. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Hidjaz, Kamal. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Katalog BPS. 2015. Statistik Daerah Kabupaten Tana Toraja 2015. Tana Toraja: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja
- Katalog BPS. 2015. Tana Toraja Dalam Angka 2015. Tana Toraja: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja
- Labolo, Muhammad. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moenir. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja.
- Rahman, Fahri Rezki. 2013. Aktualisasi Nilai Budaya Lokal dalam Kepemimpinan

Pemerintahan di Kota Palopo. Skripsi FISIP
UNHAS.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Ka-
bupaten Tana Toraja 2010-2030

Saleh, H.A., dkk. 2013. Pedoman Penelitian
Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi.
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP
UNHAS.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Admin-
istrasi Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerinta-
han. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten-
tang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No 23 Tahun 2014

Veoleta Serang. 2011. Implementasi Pengel-
olaan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UNHAS

Widagdho, Djoko, dkk. Ilmu Budaya Dasar.
Jakarta: PT Bumi Aksara.